

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH BERBASIS KOMUNITAS PADA PROGRAM DAUR
AKSI CIREUNDEU DI KAMPUNG ADAT CIREUNDEU
KELURAHAN LEUWIGAJAH KOTA CIMAHI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana terapan Program Studi
Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
(S.Tr.Sos)**

**Disusun Oleh
Lulu Rafiq Asqia
NRM: 20.03.036**



**PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL
BANDUNG
2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia kini menghadapi tiga masalah lingkungan global yang disebut oleh PBB pada pertemuan Stockholm+50 tahun 2020 lalu sebagai *Triple Planetary Crisis* yakni bumi kita mengalami kondisi krisis iklim, penghilangan aneka hayati, dan pencemaran lingkungan dimana ketiganya sangat berkaitan erat dengan kelangsungan kehidupan umat manusia. Perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penggunaan energi, industri, transportasi, bangunan, serta pertanian menjadi masalah lingkungan yang mendesak saat ini hingga kemudian menyebabkan kenaikan suhu global, kenaikan permukaan air laut, dan fenomena cuaca ekstrem. Kehilangan keanekaragaman terjadi akibat penghancuran habitat dan ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam berlebihan, dan spesies invasif, mempengaruhi ekosistem di seluruh dunia, berdampak pada ketahanan pangan, akses air bersih, dan kesejahteraan manusia. Sementara itu, pencemaran yang disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia dan alam, menyebabkan penyakit dan kematian dini serta mempengaruhi ekosistem melalui berbagai mekanisme (Stockholm+50, 2022).

Krisis iklim memiliki dampak yang sangat besar bagi kelompok masyarakat rentan, seperti masyarakat pesisir, masyarakat yang menduduki pulau-pulau kecil, perempuan, anak-anak, orang tua, penyandang disabilitas, serta rumah tangga miskin. Publikasi WHO 2021 menyatakan bahwa Mereka cenderung lebih rentan terhadap dampak negatif dari bencana alam, penurunan kualitas kesehatan, kerusakan lingkungan, dan kehilangan sumber penghidupan sebagai akibat dari perubahan iklim. fakta ini menghadirkan permasalahan lingkungan yang dimana didalamnya terdapat pengaruh baik langsung maupun tidak langsung dari pengelolaan sampah juga sangat berpengaruh bagi keberfungsian sosial Masyarakat.

Pengelolaan sampah memiliki dampak yang signifikan terhadap *triple planetary crisis*, dampaknya antara lain adalah peningkatan emisi gas rumah kaca

seperti metana dari pembusukan sampah, pencemaran lingkungan oleh limbah plastik, dan degradasi ekosistem akibat pembuangan sampah yang tidak terkontrol. Hal ini terkait dengan masifnya pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menggunakan sistem *open dumping* yang dimana sampah dibuang secara langsung ke lahan tanpa perlindungan atau pengolahan yang memadai. Praktik ini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran tanah dan pencemaran air (COP-28, Dubai).

Kondisi Indonesia yang mengalami darurat sampah terjadi ketika pengelolaan sampah di negara ini mencapai titik kritis, ditandai dengan tumpukan sampah yang meluap pada tempat pembuangan akhir (TPA) di beberapa wilayah karena kapasitas yang telah mencapai batas maksimal. Kementerian PUPR mencatat pada tahun 2021 TPA di 10 provinsi telah mengalami *over capacity*. Pada tahun 2022, sumber sampah terbesar berasal dari rumah tangga (38,5%), pasar tradisional (27,6%), dan sektor perniagaan (14,5%) (Kementerian PUPR, 2021). Faktor-faktor yang menyebabkan darurat sampah ini termasuk rendahnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sampah, kurangnya kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat Indonesia, rendahnya tanggung jawab industri, dan masalah regulasi yang belum optimal. Selain itu, kebakaran TPA yang sering terjadi di berbagai wilayah juga menjadi faktor penambah urgensi dalam menangani masalah darurat sampah ini. Menurut data KLHK 2023 terdapat setidaknya 35 TPA terbakar dalam kurun waktu 3 bulan yang tidak hanya menimbulkan pencemaran udara dan kerugian lingkungan, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian ekosistem. (KLHK, 2023)

Kondisi demikian membawa ketidakpercayaan masyarakat untuk mempercayakan pengelolaan sampah pada TPA dan mendesak kebutuhan untuk mencari alternatif dalam pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Adopsi praktik pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, seperti daur ulang, kompos, atau pengurangan sampah, menjadi lebih penting dalam konteks ini sehingga desakan untuk mengelola sampah secara mandiri di tingkat rumah tangga, lingkungan, atau komunitas didorong agar semakin meningkat dengan partisipasi aktif dari setiap lini sektor.

Nyatanya dalam membangun kepedulian dan partisipasi Masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan kita masih sangat rendah dimana data survei berdasarkan Laporan Indeks Perilaku Ketidakpedulian Lingkungan Hidup Indonesia 2018 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui bahwa pada tahun 2017, indeks ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup di Indonesia mencapai 0,72, yang artinya 72% masyarakat Indonesia tidak peduli terhadap isu-isu lingkungan (BPS, 2018).

Peralihan dari pengelolaan sampah tradisional ke ekonomi sirkular, sebagaimana disoroti dalam laporan "No Time to Waste: Closing the Climate Loop" oleh COP-28 Dubai, memiliki implikasi langsung terhadap pengurangan dampak pengelolaan sampah terhadap krisis iklim. Dalam konteks ini, ketika sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan diterapkan, dampak negatif terhadap iklim dapat dikurangi secara signifikan (COP-28, Dubai). Menerapkan model pengelolaan sampah sirkular dapat membantu mengurangi dampaknya terhadap krisis iklim, dan keberfungsian sosial kelompok rentan dapat ditingkatkan secara signifikan. Ini mencakup perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan, yang semuanya merupakan aspek penting dari kesejahteraan sosial yang holistik bagi kelompok rentan. (Bappenas, 2024)

Teori ISWM Pendekatan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Terintegrasi (ISWM) memungkinkan analisis yang komprehensif dan multidimensi serta menyediakan perspektif baru untuk pengembangan lebih lanjut. ISWM menggabungkan aliran limbah, pengumpulan, dan metode pengolahan serta pembuangan, dengan tujuan mencapai manfaat lingkungan, ekonomi, dan sosial. Model ISWM berdasarkan pendekatan *lifecycle* mengidentifikasi tiga dimensi: pertama, pemangku kepentingan dan peran regulasi dalam keberlanjutan; kedua, komponen teknis seperti pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan pembuangan limbah; dan ketiga, aspek keberlanjutan dalam pengelolaan limbah (Lardinois, I., & Klundert, A., 1999).

Urgensi pengelolaan sampah dan pemberdayaan yang memerlukan keterlibatan peran masyarakat ditemukan penelitian terdahulu yang membahas hal

tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Febrina Angraini, dan Titik Djumiarti, S.Sos, M.Si dengan judul Proses Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Terpadu Di Kelurahan Pedurungan Kidul Kota Semarang. menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa dalam mengatasi permasalahan sampah yang menumpuk di TPS maka diperlukan sebuah program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan menggerakkan masyarakat. Tahap pemberdayaan meliputi kesadaran, peningkatan kapasitas, dan enrichment. Kesadaran diawali dengan motivasi, dilanjutkan dengan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas, dan diakhiri dengan *enrichment* melalui fasilitator yang memberikan bantuan sumber daya. dalam proses penyadartahuan dan peningkatan kapasitas yakni kurangnya sosialisasi tentang kesadaran hidup bersih dan sehat, serta minimnya peran Departemen Lingkungan Hidup dalam memberikan pelatihan pengelolaan sampah.

Penelitian kedua dilakukan oleh Husni Mubarak (2021) dalam pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah Binor Proses penyadaran dimulai dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bank sampah. Kemudian, transformasi kemampuan dilakukan melalui pelatihan pembuatan kompos, pelatihan kreativitas daur ulang sampah, dan program tabungan sampah. Peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan dilakukan dengan membiasakan masyarakat agar mampu mandiri dalam pengelolaan sampah. Ditemukan perbedaan dalam kemampuan dan kesadaran masyarakat yang telah meningkat dari kebiasaan membuang sampah sembarangan menjadi kesadaran untuk mengelola dan memproses sampah menjadi lebih bermanfaat dan menjaga kebersihan lingkungan.

Penelitian yang dilakukan di Desa Dusun Kroco, Sendangsari, Kulon Progo juga menunjukkan bahwa pemberdayaan terhadap masyarakat berlangsung melalui proses belajar yang bertahap, sehingga masyarakat dapat mandiri dan mencapai kemandirian. Melalui proses pemberdayaan, terjadi perubahan kebiasaan lingkungan yang buruk dan peningkatan partisipasi masyarakat. Pemberdayaan ini juga berdampak pada aspek ekonomi dengan meningkatnya pendapatan warga melalui pengelolaan sampah, yang dipengaruhi oleh komunikasi dan peningkatan

partisipasi sebagai faktor pendukung. Namun, kurangnya aktivitas beberapa pengelola dan persaingan dari pihak pengepul menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan ini.

Ketiga penelitian tersebut menunjukkan korelasi yang kuat dalam konteks pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Secara umum, penelitian tersebut menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam upaya mengatasi masalah sampah. proses pemberdayaan yang melalui beberapa tahapan yang didalamnya sangat dibutuhkan keterlibatan masyarakat. Selain itu, penelitian menyoroti peran penting komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam keberhasilan pemberdayaan. Namun, kendala seperti kurangnya sosialisasi dan peran lembaga terkait dalam memberikan pelatihan juga diidentifikasi sebagai hambatan. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan pendekatan yang efektif dalam menghadapi tantangan lingkungan. Hal ini menegaskan pentingnya kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait untuk mencapai keberhasilan dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan

Kebaharuan atau Novelty yang ingin disampaikan peneliti melalui penelitian ini adalah memberikan gambaran proses pemberdayaan dalam perspektif pekerja sosial berwawasan lingkungan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas dengan pendekatan intervensi komunitas dimana didapati banyak tantangan pemberdayaan tidak menyesuaikan bagaimana keunikan komunitas yang menjadi sasaran program.

Tragedi longsor TPA Leuwigajah tahun 2005 memperlihatkan puncak buruknya pengelolaan sampah di Indonesia dengan menyebabkan bencana nasional yang menelan korban jiwa dengan total 157 nyawa. Dampak tragis tersebut mencerminkan kelemahan dalam sistem pengelolaan sampah yang masih mengandalkan pengelolaan sampah tradisional baik dalam pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan. Hingga delapan belas tahun berlalu, mengundang trauma bagi masyarakat Cireundeu terkait akan dibukanya kembali TPA di wilayah tempat tinggal mereka apalagi dengan maraknya TPA yang *overload* di berbagai wilayah termasuk di wilayah Bandung raya.

Kampung Adat Cireundeu yang menjadi bagian administrasi wilayah Kota Cimahi merupakan sebuah kampung yang berlokasi di eks- TPA Leuwigajah. Cireundeu kini menjadi destinasi wisata edukasi dan budaya, namun mirisnya juga menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan sampah. Pendekatan konvensional yang mengandalkan pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPA yang mengalami permasalahan di lingkungan dengan kondisi TPS yang tidak layak, tumpukan sampah yang tidak tertata dan mengganggu lingkungan hingga koordinasi pengangkutan yang tidak tertata. Dilain sisi tingkat kesadaran warga dalam perilaku membuang sampah yang hanya peduli ketika sampahnya sudah tidak berada di rumah dengan membuangnya tanpa memedulikan lokasi sekitar TPS, membuang ke sungai hingga parit hingga membakar sampah di kebun dengan alasan lahan pribadi. Namun tatkala ada permasalahan sampah pemerintah lokal lah yang dituntut untuk menyelesaikannya. Kampung Adat Cireundeu telah menyadari adanya permasalahan pengelolaan sampah dan kesadaran serta perilaku warganya terkait pengelolaan sampah yang buruk namun tidak dapat mengakses aksi yang dapat menyelesaikan permasalahan ini.

Peneliti yang tergabung dalam Tim DAUN (Daur Aksi Nusantara) upaya mengatasi masalah ini bersama-sama menggagas dan beraksi di Kampung Adat Cireundeu dengan program Daur Aksi Cireundeu. Proyek ini merupakan sebuah program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang bertujuan untuk menuntaskan sampah di sumbernya dengan menciptakan manajemen sampah yang terintegrasi, mulai dari rumah tangga hingga pengolahan akhir, dengan menggunakan teknologi digital dan pendekatan berbasis data. Menjawab tantangan ketidakpercayaan terhadap pengelolaan sampah TPA program Daur Aksi Cireundeu dirancang dengan skema pemilahan dari rumah, pengangkutan terpilah dan penuntasan sampah pada sumbernya di wilayah Cireundeu sendiri sehingga menekan laju sampah yang masuk ke TPA. Selain itu, program ini juga mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan pembangunan destinasi wisata Eco Edu Tourism, dengan harapan dapat menjadi contoh bagi pengelolaan sampah rumah tangga di Indonesia.

Program ini berlangsung sejak Mei 2023 dengan rincian waktu asesmen selama 2 bulan yakni Mei dan Juni serta waktu implementasi dilaksanakan dari bulan Juli dan terus berlanjut hingga saat ini. wilayah RW 10 terdiri dari 2 Kampung yakni Kampung Adat Cireundeu dengan jumlah rumah 197 dan Kampung Pojok Cireundeu dengan jumlah rumah sebanyak 87 rumah. Rumah tangga peserta program saat ini telah terdaftar sebanyak 100 rumah di wilayah Kampung Adat Cireundeu sehingga tercatat sudah 51% rumah tangga telah tercakup program. Program akan terus berjalan hingga dapat tercover sepenuhnya..

Pemberdayaan masyarakat berarti memberikan daya pada masyarakat Proses pemberdayaan Adi (2003) menjelaskan bahwa pemberdayaan menekankan pada proses dan tujuan, yang mencakup tujuan yang berorientasi pada integrasi masyarakat serta peningkatan kapasitas mereka untuk secara kooperatif menangani masalah yang mereka hadapi berdasarkan prinsip-prinsip demokratis dan swadaya. Dengan menekankan pada proses, Adi Isbandi membagi Tahapan pemberdayaan ke dalam 7 langkah yakni tahap Persiapan yang merupakan mencakup persiapan petugas dan persiapan lapangan, kedua tahapan asesmen yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki. Ketiga, tahapan perencanaan alternatif program atau kegiatan secara partisipatif Pada tahap ini pelaku perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana mengatasinya. Keempat tahap memformulasikan rencana aksi dengan merumuskan dan menentukan kegiatan, kelima, tahap pelaksanaan, keenam tahap evaluasi dan tahap terakhir berupa tahap terminasi.

Tahapan pemberdayaan menurut Adi Isbandi (2008) bahwa Proses pemberdayaan yang panjang pada program ini mengalami berbagai dinamika yang kemudian dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperoleh dari hasil evaluasi berkala seiring berjalanya program. Masalah yang ditemui pada pelaksanaan pemberdayaan diantaranya pada tahap asesmen yang diidentifikasi terdapat masalah ataupun sumber daya yang belum ditemui saat asesmen awal. Sebagaimana ketika asesmen mengenai pemetaan karakter masyarakat Cireundeu terkait dengan karakter dalam penerimaan program yang terpetakan pada program-program yang

didapat sebelumnya atau pada karakter yang dibaca melalui kegiatan masyarakat. Sebelumnya terpetakan karakter yang cukup sulit dalam menerima suatu program dan membutuhkan perlakuan khusus ada pada karakter warga di wilayah RT 02 dan RT 04, namun pada proses berjalannya kemudian ditemukan pula dengan karakter serupa pada sebagian warga RW 03 di blok bawah, dimana hal ini tidak teridentifikasi pada tahap asesmen.

Tahapan perencanaan alternatif, metode pertemuan *brainstorming* digunakan untuk menggali strategi pelaksanaan program yang melibatkan partisipasi masyarakat atau tokoh masyarakat. Namun, disadari bahwa tidak semua peserta dapat menyampaikan pendapat secara penuh. Oleh karena itu, sebelum pertemuan dilaksanakan, penulis menggunakan metode *bridging* untuk mendalami masalah atau isu kepada setiap individu peserta. Dengan demikian, di hari pertemuan, diharapkan seluruh peserta dapat mengungkapkan pendapatnya secara menyeluruh

Tahap pelaksanaan pemberdayaan sering kali dihadapkan pada tantangan dan perubahan, baik itu terkait dengan aspek teknis yang tidak sesuai dengan perencanaan, maupun perubahan yang muncul dari masalah yang diidentifikasi. Salah satu contohnya adalah ketika strategi pengelolaan peran kader tidak berjalan lancar karena kesalahan dalam mengidentifikasi dan memetakan peran serta menyusun rencana strategis pembagian tugas.

Tahap pelaksanaan pada penggunaan model manajemen sampah itu sendiri sepanjang pelaksanaan pada program ini telah mengalami berbagai tantangan yang menjadikan adanya penyesuaian-penyesuaian model dalam setiap aspeknya. Pada aspek pengolahan diawali dengan penggunaan model satu petugas penuntas sampah menangani 50 rumah tangga secara keseluruhan yakni sebagai petugas pengangkut, pengolah sampah organik dan Pemilah sampah daur ulang, namun model tersebut mengalami kendala dengan waktu yang membengkak dan hasil upah Lelah yang tidak mencukupi. Kemudian, dilakukan penyesuaian dengan membagi tim menjadi tim khusus untuk daur ulang dan tim khusus untuk pengolahan makanan, selain tim penuntas pengangkutan sampah. Meskipun mengalami penyesuaian-penyesuaian, model ini tetap berjalan. Begitu pula pada aspek edukasi, pengangkutan, dan rekayasa sosial yang terus dikembangkan.

Perubahan yang terjadi melalui program ini sejalan dengan proses yang masih berlanjut menunjukkan hasil positif, hingga saat ini telah terimplementasi pada 100 rumah yang memilah sampah dari rumah, terangkut secara terpilah dan diolah pada tempat pengolahan sampah yang kami namai The Jarian dengan persentase sampah yang terkelola sebanyak 78% serta dengan adanya permintaan minat kunjungan wisatawan terhadap program edukasi pengelolaan sampah. Sejalan dengan desakan COP-28 untuk melaksanakan pengelolaan sampah berkelanjutan yang membangun ekonomi sirkular serta berkontribusi pada pelaksanaan SDG's terutama pada SDG's nomor 3,7,11 dan 15.

Mewujudkan pengelolaan berkelanjutan di wilayah Kampung Adat Cireundeu masih diperlukan evaluasi mendalam untuk mengevaluasi kesesuaian model pemberdayaan yang telah diterapkan dan memastikan keberlanjutan dari perubahan yang telah dicapai.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dalam penelitian ini rumusan masalah yang dibangun adalah bagaimana tahapan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas pada program Daur Aksi Cireundeu di Kampung Adat Cireundeu Kelurahan Leuwigajah Kota Cimahi, dengan rincian berdasarkan teori tahapan pemberdayaan yang di rumuskan oleh Adi Isbandi yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana tahap persiapan
2. Bagaimana tahap asesmen
3. Bagaimana tahap perencanaan alternatif program
4. Bagaimana tahap memformulasikan rencana
5. Bagaimana tahap pelaksanaan program
6. Bagaimana tahap evaluasi

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan tahapan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas pada program Daur Aksi Cireundeu di Kampung Adat Cireundeu Kelurahan Leuwigajah Kota Cimahi. Dengan rincian sebagai berikut

1. Mendeskripsikan tahap persiapan
2. Mendeskripsikan tahap asesmen
3. Mendeskripsikan tahap perencanaan alternatif program
4. Mendeskripsikan tahap memformulasikan rencana aksi
5. Mendeskripsikan tahap pelaksanaan program
6. Mendeskripsikan tahap evaluasi

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh baik secara teoritis maupun praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang praktik *Green social work* dalam upaya pemberdayaan pengelolaan sampah yang berbasis komunitas.
2. Memperkaya pemahaman tentang perencanaan dan implementasi strategi pengelolaan lingkungan yang efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
3. Menawarkan kerangka kerja yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih model pemberdayaan lingkungan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi sirkular. Secara terperinci manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan arahan yang jelas bagi pelaksanaan program Daur Aksi Cireundeu di Kampung Adat Cireundeu, sehingga dapat membantu mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dan merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas program.
2. Menyediakan pedoman yang berguna bagi pemangku kepentingan lokal, seperti pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat setempat, dalam

merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah

3. Mendorong terciptanya dampak positif yang lebih besar dalam upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kampung Adat Cireundeu

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun berdasarkan sistematika dalam pedoman penulisan skripsi Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, sebagai berikut :

- BAB I** : **PENDAHULUAN**, memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan
- BAB II** : **KAJIAN KONSEPTUAL**, memuat tentang penelitian teRDahulu, konsep kajian yang relevan dengan penelitian, dan kerangka pikir
- BAB III** : **METODE PENELITIAN**, memuat tentang desain penelitian, sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, uji validitas dan reliabilitas alat ukur, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian
- BAB IV** : **HASIL PENELITIAN**, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan
- BAB V** : **USULAN PROGRAM**, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan
- BAB VI** : **SIMPULAN DAN SARAN**, memuat tentang simpulan dan saran